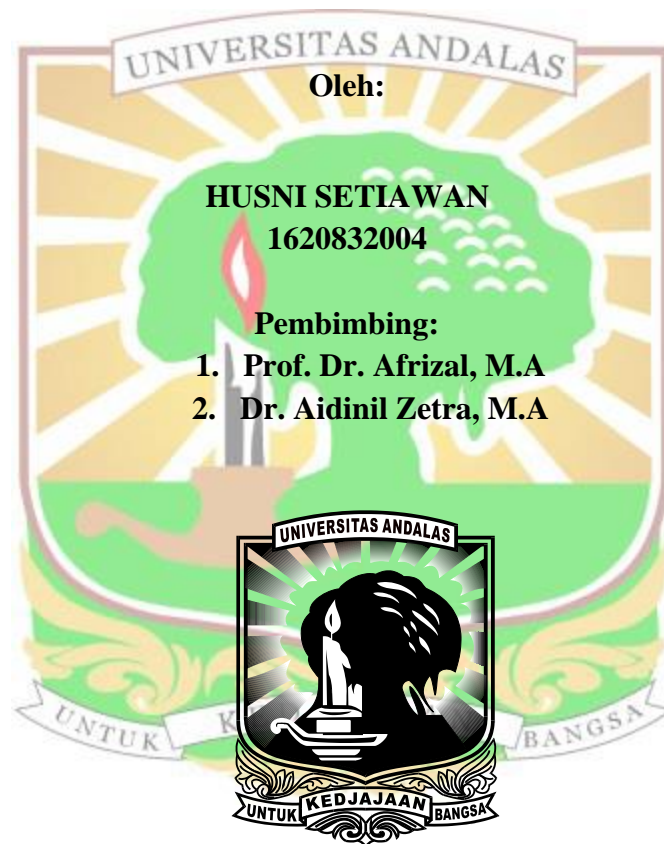


**RELASI POLITIK DALAM KOMUNITAS ADAT:
Otoritas Politik Pemimpin Adat Pasca Penetapan Kampung Adat Di
Kabupaten Siak**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS ANDALAS

2019

ABSTRAK

Husni Setiawan, 1620832004, Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Judul Tesis: Relasi Politik Dalam Komunitas Adat: Otoritas Politik Pemimpin Adat Pasca Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Afrizal M.A, (2) Dr. Aidinil Zetra, M.A. 140 halaman

Penelitian ini mengkaji tentang relasi politik dalam masyarakat desa adat. Dalam konteks desa adat, otoritas politik pemimpin adat tidak hanya bersumber dari tradisi saja namun diperkuat dengan status legal-rasional. Penguatan otoritas tersebut ternyata tidak sepenuhnya dijalankan dalam kehidupan masyarakat yang multikultural karena setiap kelompok masyarakat harus melakukan hubungan sosial, politik dan ekonomi. Fenomena ini terjadi di Kampung Adat Sakai di Kab.Siak, dimana dengan perubahan status dari desa biasa menjadi desa adat kelompok komunitas masyarakat asli tidak menjadi lebih dominan terhadap suku suku pendatang meskipun setelah diberikan hak khusus. Pemimpin adat Suku Sakai melakukan relasi politik dengan kelompok masyarakat lain dalam menjalankan pemerintahan kampung adat. Untuk menjelaskan relasi politik tersebut, penelitian ini menggunakan teori otoritas, kemudian relasi politik yang dipengaruhi oleh posisi tawar setiap kelompok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan terpilih. Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan. *Pertama*, otoritas politik pemimpin adat mengalami penguatan pasca penetapan status kampung adat. *Kedua*, relasi yang terjalin antar kelompok dalam bentuk relasi politik berorientasi pada kepentingan ekonomi. *Ketiga*, posisi tawar penduduk asli dan pendatang relatif berimbang, penduduk asli memiliki modal politik yang kuat sedangkan penduduk pendatang memiliki modal ekonomi yang kuat. *Keempat*, otoritas politik secara tradisional pemimpin adat berubah menjadi otoritas legal-rasional karena status penetapan kampung adat. Model otoritas yang terbentuk dari perubahan tersebut adalah model partikular relatif yaitu penyesuaian antara tradisi dengan struktur pemerintahan modern.

Kata Kunci: Relasi Politik, Otoritas Politik, Posisi Tawar dan Masyarakat Adat

ABSTRACT

Husni Setiawan, 1620832004, Masters in Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University. Title of Thesis: Political Relations in Indigenous Peoples: Political Authority of Indigenous Leaders Post Determination of Customary Villages in Kabupaten Siak. Advisor: (1) Prof. Dr. Afrizal M.A, (2) Dr. Aidinil Zetra, M.A. 140 pages

This research discusses political relations in indigenous village communities. In the context of customary villages, the authority of traditional leaders is not only derived from tradition but is strengthened by legal-rational status. Strengthening this authority was not fully implemented in the lives of multicultural communities because the diversity of the tribes made each community group "forced" to engage in social, political and economic relations. This phenomenon occurs in the Kampung Adat Sakai Minas, where the change of status from ordinary villages to traditional villages does not make the Sakai people become more dominant towards other tribes after being granted special rights. The traditional leader of the Sakai Tribe engages in political and economic relations with other community groups in running traditional village government. To explain the political relations, this research uses authority theory, then political relations are influenced by the bargaining position of each group. This study uses a qualitative approach to the type of case study. Data collection is done by interviewing selected informants. This research produces several conclusions. First, the political authority of adat leaders has been strengthened after the determination of the status of traditional village. Second, the relationships that exist between groups in the form of political relations are oriented to economic interests. Third, the bargaining position of indigenous people and migrants is relatively balanced, indigenous people have strong political capital while immigrants have strong economic capital. Fourth, traditional political authority traditional leaders changed to legal-rational authority because of the status of traditional village settlements. The model of authority formed by these changes is a relative particular model of the adjustment between tradition and the structure of modern government.

Keywords: Political Relations, Political Authority, Position of Bargaining and Indigenous Peoples

